



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/ve08f376>

Analisis Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Banjir melalui Sistem Drainase di Kota Medan

Meiyolanda Sormin ^{a*}, Victor Lumbanraja ^b

^a Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, meiyolanda140@gmail.com,
Universitas Sumatera Utara, Medan

^b Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, victor.lumbanraja@usu.ac.id,
Universitas Sumatera Utara, Medan

* Penulis Korespondensi: Meiyolanda Sormin

ABSTRACT

Flooding is a problem that continues to occur in Medan City due to suboptimal drainage conditions, river sedimentation, massive development, and reduced water catchment land. Flood management cannot be carried out by one agency alone because it involves the authority of the central government, provincial governments, and city governments. Therefore, collaboration between governments is needed in handling floods through drainage systems. However, in its implementation, various obstacles are still found, such as weak coordination, differences in priorities between agencies, and the absence of a strongly integrated collaboration mechanism. This study aims to analyze the collaboration of the central and regional governments in handling floods through the drainage system in Medan City and to find out the factors that hinder this collaboration.

This study uses the collaborative governance theory of Ansell and Gash (2008) with indicators of initial conditions, facilitative leadership, institutional design, and collaborative processes. The research method used is a qualitative method. The data collection technique was carried out through interviews, observations, and documentation with informants from the Medan City Water Resources, Highways, and Construction Development, the Public Works and Spatial Planning Office of North Sumatra Province, the Sumatra II River Area Center, and flood-affected communities.

The results of the study show that collaboration between agencies has basically run through formal and informal communication, division of tasks according to authority, and the implementation of river and drainage normalization. The collaboration also resulted in several initial achievements, such as increasing water holding capacity and faster inundation in some areas. However, collaboration has not run optimally due to the absence of a joint Standard Operating Procedure (SOP) and Decree (SK), personnel change, weak documentation and knowledge transfer, differences in priorities between agencies, and low community participation. In addition, the results of flood management have not been fully felt by the community because floods still occur during heavy rains. Therefore, institutional strengthening, coordination, and community participation are needed so that collaboration in flood management can run more effectively and sustainably.

Keywords: Collaborative Governance; Flood Management; Drainage System; Medan City

Abstrak

Banjir merupakan permasalahan yang terus terjadi di Kota Medan akibat kondisi drainase yang belum optimal, sedimentasi sungai, pembangunan yang masif, serta berkurangnya lahan resapan air. Penanganan banjir tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja karena melibatkan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antarpemerintah dalam penanganan banjir melalui sistem drainase. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai

hambatan, seperti lemahnya koordinasi, perbedaan prioritas antarinstansi, dan belum adanya mekanisme kolaborasi yang terintegrasi secara kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan banjir melalui sistem drainase di Kota Medan serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat kolaborasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) dengan indikator kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, dan masyarakat terdampak banjir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antarinstansi pada dasarnya dilaksanakan melalui komunikasi formal dan informal, pembagian tugas sesuai kewenangan, serta pelaksanaan normalisasi sungai dan drainase. Kolaborasi juga menghasilkan beberapa capaian awal, seperti meningkatnya kapasitas tampung air dan genangan yang lebih cepat surut di beberapa wilayah. Namun, kolaborasi belum berjalan optimal karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Surat Keputusan (SK) bersama, pergantian personel, lemahnya dokumentasi dan transfer pengetahuan, perbedaan prioritas antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, hasil penanganan banjir belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena banjir masih terjadi saat hujan deras. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, koordinasi, dan partisipasi masyarakat agar kolaborasi penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*; Penanganan Banjir; Sistem Drainase; Kota Medan

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana alam yang cukup tinggi karena letak geografisnya yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik dunia serta dipengaruhi oleh faktor musim dan cuaca. Dari berbagai jenis bencana alam yang terjadi di Indonesia, banjir merupakan salah satu yang paling dominan dan sering menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga awal November 2025 tercatat 2.726 kejadian bencana, dengan banjir sebagai bencana yang paling banyak terjadi yaitu sebanyak 1.340 kejadian. Di Provinsi Sumatera Utara, banjir masih menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi, dan Kota Medan menempati posisi kedua dengan jumlah kejadian banjir terbanyak setelah Kabupaten Deli Serdang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir di Kota Medan masih belum optimal.

Banjir yang terjadi di Kota Medan terus berulang setiap tahun dengan dampak yang semakin luas. Pada November 2024, banjir melanda sepuluh kecamatan akibat meluapnya Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Sei Belawan sehingga merendam ribuan rumah dan berdampak pada puluhan ribu jiwa. Pada November 2025, Pemerintah Kota Medan bahkan menyatakan banjir yang terjadi merupakan banjir terbesar yang pernah melanda Kota Medan dengan puluhan ribu masyarakat harus mengungsi serta terganggunya jaringan listrik dan komunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan banjir masih menjadi tantangan utama yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan.

Penanganan banjir dilakukan melalui upaya struktural dan nonstruktural, namun dalam konteks perkotaan sistem drainase memegang peranan yang sangat penting. Sistem drainase berfungsi mengalirkan kelebihan air hujan, mengurangi genangan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan perkotaan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang menegaskan pentingnya sistem drainase dalam mengendalikan genangan akibat air hujan. Meskipun Kota Medan memiliki jaringan drainase sepanjang lebih dari 7.479 km, pada kenyataannya masih banyak saluran yang tidak berfungsi optimal, mengalami sedimentasi, dipenuhi sampah, serta belum mendapatkan pemeliharaan secara maksimal.

Dalam penanganan banjir melalui sistem drainase, Pemerintah Kota Medan memiliki kewenangan pada pengelolaan drainase perkotaan, sedangkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II memiliki kewenangan pada sistem drainase dan sungai yang saling terhubung. Kondisi tersebut menyebabkan Pemerintah Kota Medan tidak dapat menangani banjir secara

mandiri sehingga diperlukan kolaborasi antarpemerintah untuk mewujudkan pengelolaan sistem drainase yang terpadu dari hulu hingga hilir.

Namun demikian, kolaborasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Pemeliharaan drainase yang belum dilakukan secara rutin menyebabkan sedimentasi dan penumpukan sampah mengurangi kapasitas saluran. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran, sinkronisasi program, dan koordinasi lintas instansi juga belum berjalan optimal. DPRD Sumatera Utara menyampaikan bahwa penanganan banjir di Kota Medan masih terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat melalui BBWS Sumatera II. Akibatnya, pelaksanaan program penanganan banjir masih bersifat sektoral sehingga sistem drainase belum mampu berfungsi secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan regulasi yang menekankan pentingnya sistem drainase yang terintegrasi dengan pelaksanaan di lapangan yang masih menghadapi lemahnya koordinasi, perbedaan kewenangan, dan belum optimalnya kolaborasi antarlembaga. Penanganan banjir di Kota Medan tidak dapat lagi dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan *collaborative governance* yang mampu menyinergikan peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan sistem drainase secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *collaborative governance* berperan penting dalam penanganan banjir. Namun, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas proses kolaborasi secara umum, pendekatan konseptual, atau evaluasi teknis sistem drainase. Belum terdapat penelitian yang secara empiris mengintegrasikan kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan banjir melalui sistem drainase sebagai instrumen utama pengendalian banjir di Kota Medan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan banjir melalui sistem drainase di Kota Medan berdasarkan model *collaborative governance* Ansell dan Gash.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Good Governance*

Good Governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. World Bank (dalam Candra, 2024:5) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Menurut Karso (2021), *good governance* adalah pengelolaan yang baik, tata pemerintahan yang baik dan beribawa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *good governance* yaitu suatu tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai yang baik dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Dalam implementasinya, prinsip *good governance* tidak hanya menekankan pada kinerja pemerintah secara individual, tetapi juga pada pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

2.2. *Collaborative Governance*

Shergold (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai suatu proses yang bersifat transformatif mulai dari hubungan yang bersifat komando hingga sampai pada interaksi yang bercirikan kolaborasi. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai tata kelola pemerintahan yang menekankan kolaborasi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Dalam Model *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash (2008), ada empat tahapan dalam kolaborasi yang terdiri dari kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaboratif yang terdiri dari lima tahapan yaitu dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen dalam proses kolaborasi (*commitment to the collaboration process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dan hasil antara (*intermediated outcomes*).

2.3. Manajemen Bencana

Nurjanah, dkk (dalam Permana, 2018) menjelaskan bahwa manajemen bencana adalah ilmu yang mempelajari tentang bencana dan segala aspek yang terkait dengannya, terutama risiko bencana serta cara menghindari risiko tersebut. Manajemen bencana merupakan proses dinamis yang melibatkan berbagai fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Menurut Ulum (2014), manajemen bencana adalah proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya lingkungan yaitu alam untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat, terutama di area rawan bencana. Menurut Sinaga (2015),

manajemen bencana adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan bencana dan keadaan darurat, sekaligus memberikan kerangka kerja untuk menolong masyarakat dalam keadaan beresiko tinggi agar dapat menghindari ataupun pulih dari dampak bencana.

2.4. Banjir dan Sistem Drainase

Menurut Syukur (2021), Banjir adalah bencana akibat curah hujan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan saluran pembuangan yang memadai sehingga merendam wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki. Banjir bisa juga terjadi karena tembusnya sistem aliran air yang ada sehingga daerah yang rendah terkena dampak kiriman banjir. Menurut Setyawan (dalam Silalahi & Harahap, 2021), banjir adalah sebuah proses alami yang terjadi ketika debit air sungai menjadi sangat tinggi hingga melebihi kemampuan saluran sungai untuk menampungnya, sehingga air meluap ke daerah sekitar.

Menurut Maryono (2021), sistem drainase adalah ilmu atau cara untuk mengalirkan air dari suatu tempat, baik yang ada dipermukaan tanah ataupun air yang berada di dalam lapisan tanah, sehingga muka air di tempat tersebut turun atau berkurang sampai batas yang diinginkan. Selain itu, Riyanto Haribowo (2022). Sistem drainase adalah sejumlah prasarana drainase seperti saluran, dan bangunan-bangunan lain, yang saling berhubungan secara sistemis satu dengan yang lainnya, agar tujuannya dalam mengalirkan air dapat berjalan dengan baik.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data serta hasil terkait kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan banjir melalui sistem drainase di Kota Medan yang prosesnya sesuai dengan instrumen penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, dengan pertimbangan bahwa ketiga instansi tersebut mewakili tiga level pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kota, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam pengelolaan sistem drainase serta penanganan banjir di Kota Medan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive dengan tiga kategori informan yaitu informan kunci (Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan), informan utama (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara), dan informan pendukung (Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative governance sangat erat kaitannya dengan penanganan banjir. Dalam penanganan banjir, tidak bisa hanya dilakukan secara parsial atau hanya dengan satu pihak saja. Dalam konteks ini, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama dalam menangani banjir. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas permasalahan banjir yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari kewenangan, ketersediaan sumber daya, hingga kepentingan antaraktor yang terlibat. Pembagian kewenangan penanganan banjir melalui sistem drainase menunjukkan perbedaan fokus peran tiap tingkat pemerintahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembangunan dan pengelolaan sistem drainase perkotaan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga mampu mengoptimalkan pengaliran air serta mengurangi potensi terjadinya genangan dan banjir di kawasan perkotaan. Pengelolaan drainase perkotaan tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sejalan dengan itu, teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan permasalahan publik sangat bergantung pada proses kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4.1 Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Kondisi awal kolaborasi penanganan banjir melalui sistem drainase di Kota Medan didorong oleh tingginya kebutuhan untuk mengatasi banjir yang sebagian besar disebabkan oleh buruknya sistem drainase perkotaan. Pemerintah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, namun implementasinya belum sepenuhnya selaras dengan regulasi sehingga masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai peran masing-masing instansi. Selain itu, kolaborasi menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, pembebasan lahan, kepadatan infrastruktur bawah tanah, akses pembersihan drainase yang sulit, serta rendahnya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah ke saluran drainase. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan sumber daya dan kapasitas antarinstansi sehingga penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara mandiri.

Meskipun demikian, terdapat insentif yang kuat bagi setiap instansi untuk berkolaborasi karena sistem drainase dan sungai saling bergantung serta melibatkan kewenangan lintas tingkat pemerintahan dan wilayah. BBWS Sumatera II, Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas SDABMBK Kota Medan telah membangun pola kerja sama melalui forum koordinasi dan mekanisme kelembagaan yang mendukung kolaborasi. Namun, efektivitas kolaborasi masih dipengaruhi oleh perbedaan prioritas program antarinstansi dan hasil penanganan yang belum optimal, sebagaimana masih ditemukannya wilayah yang tetap mengalami banjir meskipun pembangunan drainase telah dilakukan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi, penyelarasan kepentingan, serta peningkatan kapasitas bersama agar kolaborasi dapat berjalan lebih efektif.

4.2 Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjalankan kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi penanganan banjir melalui sistem drainase di Kota Medan melalui peran masing-masing sebagai penghubung, fasilitator koordinasi, dan penyelaras kebijakan. Kepala BBWS Sumatera II berperan menjaga komunikasi lintas sektor, Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah, sedangkan Dinas SDABMBK Kota Medan secara proaktif memperjuangkan kebutuhan daerah melalui koordinasi dan dukungan terhadap program seperti NUFReP. Peran tersebut menunjukkan adanya upaya membangun kolaborasi sesuai konsep kepemimpinan fasilitatif Ansell dan Gash, yaitu menghubungkan aktor, mendorong dialog, dan memfasilitasi kerja sama antarinstansi.

Namun, pelaksanaan kepemimpinan fasilitatif belum sepenuhnya optimal. Koordinasi yang terbangun di tingkat pimpinan belum selalu berjalan efektif pada tingkat operasional, sementara inisiatif kolaborasi masih cenderung bersifat insidental dan lebih responsif saat terjadi banjir daripada terencana secara berkelanjutan. Selain itu, masyarakat masih merasa kurang dilibatkan dan belum memiliki ruang yang memadai untuk menyampaikan aspirasi, sehingga terjadi kesenjangan antara harapan dan praktik di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif masih perlu diperkuat melalui mekanisme kolaborasi yang lebih sistematis, konsisten, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyelaraskan pelaksanaan antarinstansi.

4.3 Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Antarinstansi membentuk desain kelembagaan dalam kolaborasi penanganan banjir melalui sistem drainase di Kota Medan melalui pembagian kewenangan yang jelas antara serta didukung oleh mekanisme koordinasi yang berjalan secara rutin. Namun, kolaborasi masih menghadapi kelemahan karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama lintas instansi. Masing-masing instansi masih menggunakan prosedur internal, sementara keterlibatan antaraktor lebih didasarkan pada pembagian tugas dan koordinasi yang bersifat fleksibel daripada aturan formal. Kondisi ini memudahkan respons di lapangan, tetapi berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan inkonsistensi dalam pelaksanaan kolaborasi.

Di sisi lain, komunikasi dan transparansi antarinstansi berjalan cukup baik melalui pertemuan rutin dan koordinasi di tingkat pimpinan maupun teknis, sehingga mendukung pelaksanaan program penanganan banjir. Meskipun para instansi menilai desain kelembagaan saat ini sudah cukup efektif, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti belum adanya mekanisme operasional bersama, keterlibatan aktor yang masih situasional, serta belum banyaknya saluran partisipasi dan pengaduan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa desain kelembagaan masih perlu diperkuat agar kolaborasi menjadi lebih terstruktur, konsisten, inklusif, dan mampu menjamin partisipasi seluruh pemangku kepentingan secara optimal.

4.4 Proses Kolaboratif

4.4.1 Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*)

Dialog tatap muka dalam kolaborasi penanganan banjir melalui sistem drainase di Kota Medan dilaksanakan cukup baik di tingkat antarinstansi melalui komunikasi formal, seperti rapat koordinasi dan musrenbang, maupun komunikasi informal melalui telepon, *WhatsApp*, dan diskusi langsung di lapangan. Pola komunikasi ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat, koordinasi yang fleksibel, serta pembagian tugas yang lebih efektif dalam penanganan banjir.

Namun, dialog tersebut belum sepenuhnya inklusif karena masyarakat masih belum banyak dilibatkan dalam proses kolaborasi. Keterlibatan warga cenderung bersifat reaktif setelah banjir terjadi, sementara

saluran komunikasi dan pengaduan belum tersosialisasi dengan baik. Akibatnya, masyarakat kurang memahami proses kolaborasi yang berlangsung dan belum merasakan adanya ruang dialog yang memadai dengan pemerintah.

4.4.2 Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan antarinstansi dalam penanganan banjir dibentuk melalui hubungan kerja yang berlangsung lama, konsistensi pelaksanaan program, komunikasi yang intensif, serta komitmen untuk menjalankan kesepakatan bersama. Hubungan tersebut membuat proses kolaborasi menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan mampu mengurangi potensi konflik antar pihak.

Sebaliknya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih belum kuat. Masyarakat menilai upaya penanganan banjir masih bersifat sementara dan belum memberikan solusi yang dirasakan secara nyata, sehingga hasil program belum mampu meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap efektivitas kolaborasi pemerintah.

4.4.3 Komitmen terhadap Proses (*Commitment to the Process*)

Komitmen antarinstansi terlihat dari penyusunan rencana aksi yang jelas, pembagian tugas berdasarkan kewenangan, serta keyakinan bahwa kolaborasi merupakan cara terbaik untuk menangani banjir. Para aktor juga menunjukkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi melalui komunikasi yang baik, kepemimpinan yang aktif, dan dukungan sumber daya.

Meskipun demikian, komitmen tersebut masih menghadapi tantangan akibat seringnya pergantian personel di setiap instansi. Pergantian sumber daya manusia menyebabkan hilangnya pengetahuan, pengalaman, dan hubungan kerja yang sudah dibangun sehingga proses kolaborasi sering harus dimulai kembali dari awal.

4.4.4 Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Pemahaman bersama antarinstansi dibentuk melalui kesamaan persepsi mengenai pembagian peran, tanggung jawab, dan pentingnya integrasi antara sistem drainase dan sungai. Kondisi ini mempermudah koordinasi karena setiap instansi memahami tugas dan fungsi masing-masing dalam penanganan banjir.

Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya selaras akibat perbedaan prioritas, kecepatan respons, dan keterbatasan sumber daya antarinstansi. Selain itu, masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kolaborasi yang dilakukan pemerintah sehingga kesepahaman belum terbentuk secara menyeluruh di antara seluruh pemangku kepentingan.

4.4.5 Hasil Antara (*Intermediate Outcomes*)

Kolaborasi menghasilkan beberapa capaian awal, seperti peningkatan kapasitas drainase, normalisasi sungai, integrasi sistem drainase dengan sungai, serta berkurangnya genangan di beberapa wilayah sehingga banjir lebih cepat surut dibandingkan sebelumnya. Selain itu, kolaborasi juga memberikan manfaat berupa dukungan anggaran, koordinasi program, dan penguatan kerja sama antarinstansi.

Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena banjir masih sering terjadi saat hujan deras. Permasalahan pemeliharaan drainase, kurangnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur juga menjadi hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kolaborasi masih lebih terlihat pada aspek teknis daripada dampak nyata yang dirasakan masyarakat, sehingga penguatan pemeliharaan dan keterlibatan publik masih diperlukan.

4.5 Faktor Penghambat Kolaborasi

4.5.1 Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Surat Keputusan (SK) Bersama

Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Surat Keputusan (SK) bersama menjadi hambatan utama dalam kolaborasi penanganan banjir karena koordinasi masih bergantung pada komunikasi informal dan hubungan personal. Meskipun setiap instansi memiliki tugas dan fungsi masing-masing, belum terdapat pedoman operasional lintas instansi yang mengatur mekanisme kolaborasi. Menurut Ansell dan Gash (2008), kondisi ini menunjukkan perlunya aturan bersama agar kolaborasi berjalan lebih konsisten dan terstruktur.

4.5.2 Hambatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pergantian personel yang sering terjadi menyebabkan proses koordinasi harus dimulai kembali karena pejabat baru memerlukan waktu untuk memahami program dan pola kerja yang telah berjalan. Akibatnya,

keberlanjutan kolaborasi terganggu dan menunjukkan bahwa kolaborasi masih bergantung pada individu, bukan pada sistem kelembagaan yang kuat sebagaimana dikemukakan Ansell dan Gash (2008).

4.5.3 Perbedaan Prioritas dan Kepentingan Antarinstansi

Perbedaan prioritas antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat menyebabkan respons terhadap penanganan banjir tidak selalu selaras. Pemerintah Kota Medan membutuhkan tindakan yang cepat, sedangkan pemerintah provinsi dan pusat harus membagi perhatian pada wilayah lain. Menurut Ansell dan Gash (2008), kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman bersama (*shared understanding*) belum sepenuhnya terbentuk.

4.5.4 Keterbatasan Sumber Daya dan Kondisi Lingkungan

Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, pembebasan lahan, serta kondisi lingkungan menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas penanganan banjir. Walaupun kapasitas drainase meningkat, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena banjir masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa *intermediate outcomes* belum cukup kuat untuk memperkuat kepercayaan dan komitmen para pihak.

4.5.5 Rendahnya Keterlibatan dan Persepsi Masyarakat

Partisipasi masyarakat masih rendah dan cenderung bersifat reaktif setelah banjir terjadi. Selain itu, masyarakat belum memahami proses kolaborasi serta minim memperoleh informasi dan akses pengaduan. Menurut Ansell dan Gash (2008), kondisi ini menunjukkan bahwa *shared understanding* dan *intermediate outcomes* belum tercapai secara optimal.

4.5.6 Lemahnya Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasca Pembangunan Drainase

Pemeliharaan drainase yang belum optimal, seperti saluran yang jarang dibersihkan dan kerusakan infrastruktur, mengurangi manfaat pembangunan yang sudah dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam menjaga keberlanjutan hasil kolaborasi sehingga manfaatnya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Menurut Ansell dan Gash (2008), hal tersebut mencerminkan belum optimalnya *commitment to the process* dan *intermediate outcomes*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Medan dalam penanganan banjir melalui sistem drainase di Kota Medan dilaksanakan dengan baik, namun belum optimal. Kolaborasi didukung oleh kesamaan tujuan, komunikasi yang baik, kepemimpinan yang aktif, serta pembagian tugas sesuai kewenangan. Meskipun demikian, belum adanya SOP dan SK bersama menyebabkan koordinasi masih bergantung pada komunikasi informal, sehingga efektivitas kolaborasi dan hasil yang dirasakan masyarakat belum maksimal.

Faktor penghambat kolaborasi meliputi belum adanya SOP dan SK bersama, pergantian personel, perbedaan prioritas antarinstansi, keterbatasan sumber daya, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta belum optimalnya pemeliharaan drainase. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, koordinasi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan infrastruktur agar kolaborasi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

SARAN

- Menyusun SOP dan SK bersama sebagai pedoman resmi pelaksanaan kolaborasi antarinstansi.
- Memperkuat forum koordinasi untuk menyelaraskan prioritas program pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Medan.
- Membangun database bersama serta sistem dokumentasi dan transfer pengetahuan guna menjaga keberlanjutan kolaborasi saat terjadi pergantian personel.
- Meningkatkan pemeliharaan rutin drainase dan sungai melalui pembagian tugas yang jelas antarinstansi.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, gotong royong, serta penyediaan call center dan media pengaduan yang mudah diakses.
- Memperkuat pengelolaan lingkungan dengan mengendalikan sedimentasi, menjaga lahan resapan air, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke drainase.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal Of Public Administration Research and Theory*, 18 (4) 543-571.
- [2] Asmorowati, E. T., Rahmawati, A., Sarasanty, D., Kurniawan, A. A., Rudiyanto, M. A., Nadya, E., & Nugroho, M. W. (2021). *Drainase Perkotaan. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia*.
- [3] Bogdan dan Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja, Bandung.
- [4] Candra, M., & MH, C. (2024). *Birokrasi dan Good Governance*. Prenada Media.
- [5] Chourmain. (2008). *Acuan Normatif Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Al-Haramain Publishing House.
- [6] Dartiningsih, B. E. (2016). *Gambaran Umum Lokasi, Subjek, Dan Objek Penelitian*. Buku Pendamping Bimbingan Skripsi, 129, 135.
- [7] Denhardt, JV., dan Robert B. Denhardt. (2003). *The New Public Service: Serving, not Steering*. London, England: M.E. Sharpe.
- [8] Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Ugm Press.
- [9] Habibah, E. N., Sos, S., & Rumah, P. P. (2021). *Collaborative Governance: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah*. Penerbit Pustaka Rumah Cinta.
- [10] Hadjon, M Philipus., dkk. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- [11] Marto, S. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yayasan kita menulis.
- [12] Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja
- [13] Rosdakarya Offset, Bandung.
- [14] Moleong, L. J. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- [15] Ridwan, HR. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- [16] Silalahi, B., & Harahap, M. E. (2021). *Penyebab potensi banjir di daerah aliran sungai Deli Kota Medan*. Penerbit Adab.
- [17] Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- [18] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- [19] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- [20] Usiono., Utami, T., Nasution, F., Nanda, M. (2018). *Disaster Management Perspektif Kesehatan dan Kemanusiaan*. Perdana Publishing, Medan.
- [21] Wulandjani, H., Widiyahseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., ... & Islam, N. (2025). *Collaborative Governance*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.
- [22] Hidayatullah, M. A., Purnaweni, H., & Yuwono, T. (2023). *Proses collaborative governance dalam penanganan banjir di Kota Semarang City*. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 276-285.
- [23] Huxham, Chris. 2003. *Theorizing collaboration practice*. *Public Management Review* 5:401–23.
- [24] Ibrahim, N. I., Berhithu, P. T., & Puturuhi, F. (2022). *Evaluasi Sistem Drainase dalam Upaya Penanggulangan Banjir (Studi Kasus Kelurahan Honipopu Kota Ambon)*. *Jurnal Geografi dan Pengajarannya*, 20(2), 131-143.
- [25] Imperial, Mark. (2005). *Using collaboration as a governance strategy: Lessons from six watershed management programs*. *Administration & Society* 37:281–320.
- [26] Permana, S. A. (2018). *Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis Di Wilayah Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis Oleh: Saraswati Ayudina Permana*.
- [27] Saidah, H., Nur, N. K., Rangan, P. R., Mukrim, M. I., Tamrin, T., Tumpu, M., & Sindagamanik, F. D. (2021). *Drainase Perkotaan*. Yayasan Kita Menulis.
- [28] Sandu, Siyoto dan M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- [29] Sari, A. A., Sabilla, A. A., & Hertati, D. (2020). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik*. *Syntax Idea*, 2(5), 21-35.
- [30] Sihaloho, N. T. P. (2022). *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Medan*. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(1), 161.
- [31] Soselisa, H. C., & Puturuhi, D. (2021). *Penerapan Prinsip New Publik Service dalam Pelayanan STNK pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap*. *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2(2), 315-330.
- [32] Vangen, Siv, and Chris Huxham. (2003). *Enacting leadership for collaborative advantage: Dilemmas of ideology and pragmatism in the activities of partnership managers*. *British Journal of Management* 14: S61–76.

- [33] Wieber, E. P., Lovrich, N. P., & Gaffiney, M (2005). Collaboration, Enforcement, And Endangered Species: A Framework for Assessing Collaborative Problem-Solving Capacity. *Society And Natural Resources*, 18 (8), 667-698.
- [34] Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- [35] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.
- [36] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- [37] Peraturan Wali Kota Medan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan.
- [38] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- [39] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://bnpb.go.id/berita/sebanyak-3-267-rumah-warga-kota-medan-terendam-banjir-hingga-satu-meter> (diakses pada 03 Desember 2025)
- [40] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://www.bnpb.go.id/> (diakses pada 03 Desember 2025)
- [41] Detik.com. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8223659/64-426-meter-drainase-di-medan-dibersihkan-warga-belum-menyeluruh> (diakses pada 27 Desember 2025)
- [42] IniMedanbung.com. <https://www.inimedanbung.com/lingkungan-hidup/kota-medan-deli-serdang-dikepung-banjir-dprd-sumut-pertanyakan-fungsi-bendungan-lau-simeme/47522/> (diakses pada 27 Desember 2025)
- [43] Kompas.com. <https://medan.kompas.com/read/2024/11/29/074058678/banjir-di-medan-meluas-10-kecamatan-terendam-akibat-luapan-3-sungai> (diakses pada 28 November 2025)
- [44] Kompas.com. <https://medan.kompas.com/read/2025/10/20/190637778/persoalan-banjir-di-medan-banyak-drainase-tak-terhubung-ke-sungai?page=all> (diakses pada 27 November 2025)
- [45] Portal Pemerintah Kota Medan. https://portal.medan.go.id/berita/percepatan-penanganan-banjir-di-bulan-agustus-dinas-pu-kota-medan-normalisasi-drainase-sepanjang-21830-meter_read2073.html (diakses pada 28 Desember 2025)
- [46] Portal Pemerintah Kota Medan. https://portal.medan.go.id/berita/januari-juli-2023-16621-meter-drainase-di-medan-dibenahi_read3406.html (diakses pada 28 Desember 2025)
- [47] Portal Pemerintah Kota Medan. https://portal.medan.go.id/berita/banjir-medan-85591-warga-mengungsi-di-305-lokasi-pemko-medan-fokus-evakuasi-dan-logistik-pengungsi_read5761.html (diakses pada 28 Desember 2025)